

Catatan Perjalanan Menuju Indonesia Tanpa Stigma

CERITA DARI TIGA KOTA

DOKUMENTASI PRAKTIK TERBAIK MITRA KERJA RUMAH CEMARA

Lembaga Persaudaraan Korban NAPZA Makassar (Makassar)
Lembaga Kemanusiaan Pontianak Plus (Pontianak)
Yayasan GAYa Nusantara (Surabaya)

Catatan Perjalanan Menuju Indonesia Tanpa Stigma

CERITA DARI TIGA KOTA

Dokumentasi Praktik Terbaik

Mitra Kerja Rumah Cemara

2020

Tim Penyusun:

Tri Irwanda Maulana

Faisyal Sjahrial

Arif Rachman Iryawan

Penyunting:

Patri Handoyo

Tata Letak:

Tri Irwanda Maulana

Rumah Cemara

Jl. Gegerkalong Girang No. 52, Bandung, Indonesia

Website : <https://rumahcemara.or.id/>

Email : admin@rumahcemara.or.id

Telp : +62 22 201 1550

Pengantar

Rumah Cemara memiliki mitra kerja dalam menjalankan program di sejumlah daerah di Indonesia. Program yang dijalankan pada dasarnya merupakan bagian dari cita-cita Rumah Cemara, Indonesia tanpa stigma. Ini adalah visi ideal agar pengguna narkoba, orang dengan HIV-AIDS, dan kelompok lain yang sering terpinggirkan mendapat kesetaraan hak dalam hidupnya, sama dengan masyarakat lain.

Tulisan ini berniat merekam beberapa bagian terbaik dari program mitra kerja Rumah Cemara. Ada tiga lembaga mitra yang terpilih sebagai bagian dari tulisan ini, yakni Lembaga Persaudaraan Korban NAPZA Makassar (LPKNNM) di Makassar, Lembaga Kemanusiaan Pontianak Plus di Pontianak, dan Yayasan GAYa Nusantara di Surabaya. Setiap lembaga mitra akan diceritakan secara terpisah melalui hasil liputan pada November dan Desember 2019.

Seluruh tulisan dalam buku ini juga dapat Anda baca melalui website kami di <https://rumahcemara.or.id/>

Selamat mengikuti!

Bandung, April 2020

Tim Penyusun

Daftar Isi

Pengantar	1
Cerita dari Makassar.....	3
Ballata, Rumah bagi Semua Orang.....	3
Jerih Payah Berbuah Pengakuan.....	5
Beradaptasi dengan Kecanggihan Teknologi tanpa Melupakan yang Lama.....	6
Cerita dari Pontianak.....	11
Kiprah Komunitas Mengatasi HIV-AIDS di Kota Khatulistiwa.....	11
Semangat Positif dari Komunitas.....	12
Fasilitas yang Sudah Tersedia Belum Banyak Terpakai.....	14
Keberlanjutan Program Jadi Tantangan.....	15
Cerita dari Surabaya	17
Menekan Stigma LGBT dengan Berbaur di Masyarakat.....	17
Kesehatan adalah Hak Universal Semua Orang	19
Melawan Stigma dengan Pergaulan Inklusif di Masyarakat.....	21
Berjejaring Memperjuangkan Keberagaman Identitas	23
Sumber Data.....	27

Ballata, Rumah bagi Semua Orang



Zona *Drugs Education* di Ballata, tempat pengguna narkoba berbagi informasi tentang kesehatan, hukum, dan beragam hal lainnya dengan santai (Foto: Tri Irwanda)

Bangunan berukuran sekitar 20 kali 15 meter itu bernama Ballata. Dalam bahasa Makassar, Balla berarti rumah. Ballata bisa diartikan rumah kita atau rumah bagi semua orang.

Lokasinya berada di pinggir jalan raya Inspeksi Kanal Borong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ballata berdampingan dengan bangunan lainnya yang berjejer. Sekilas tidak ada yang istimewa dari tempat itu. Tumpukan eceng gondok tampak subur memenuhi badan sungai yang ada di seberang jalan.

Sore itu, sekelompok anak muda terlihat asik ngobrol di halaman samping Ballata. Pada tembok pembatas bangunan terlihat grafiti bertema narkoba. Mereka menyebutnya zona *Drugs Education*. Semacam tempat santai untuk berbicara tentang banyak hal, khususnya narkoba.

Masuk ke dalam bangunan, di ruangan tengah, berbagai poster terlihat menghiasi dinding. Semuanya punya pesan. Sebagian soal HIV-AIDS, sebagian lagi menyangkut narkoba. Sebuah meja rapat menjadi benda sentral di ruangan itu. Pemandangan yang lazim ditemui di kantor sekretariat sebuah organisasi.

“Di sinilah kami berkumpul sehari-hari. Diskusi maupun sekedar sharing pengalaman,” ujar Farid Satria (42), Direktur Lembaga Persaudaraan Korban NAPZA Makassar (LPKMN).

LPKMN dibentuk sembilan tahun lalu dengan tujuan menjadi wadah bagi para pengguna narkoba untuk berkumpul dan memperjuangkan hak asasinya. Ini jadi kebutuhan karena di Makassar saat itu tidak ada organisasi yang bisa menaungi para pengguna NAPZA secara

khusus. Kelompok pengguna NAPZA tersebar di sejumlah komunitas, seperti di kelompok dukungan sebaya, maupun di lembaga swadaya masyarakat.

Keberadaan LPKNN tidak terlepas dari upaya pengguna narkoba di Makassar untuk bersatu mengikis stigma alias cap buruk yang melekat di mata pihak lain, termasuk pemerintah. Farid adalah salah satu tokoh kunci dalam upaya itu.

Ia menuturkan, banyak orang beranggapan pengguna narkoba hanya sampah masyarakat. Bahkan, tidak jarang terdengar ungkapan agar para pengguna narkoba dibiarkan saja, hingga ajal menjemput.

Pria penyandang gelar sarjana hukum ini merasa perlu mendatangi berbagai pihak untuk membawa suara komunitasnya. Ia ingin pengguna narkoba diperlakukan sama dengan masyarakat lainnya, punya hak dasar sebagai manusia. Satu demi satu kantor pemerintahan yang strategis bagi gerakannya ia kunjungi, di antaranya Biro NAPZA Pemprov Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan, maupun Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat provinsi maupun kota.

Pada setiap pertemuan, ia selalu minta waktu memperkenalkan LPKNN. Ia ajak para peserta untuk melihat pengguna narkoba dari sudut pandang yang berbeda. Banyak pertanyaan yang harus dijawabnya dalam setiap pertemuan, terutama menyangkut perilaku pengguna NAPZA yang identik dengan kriminalitas.

Dengan gigih, ia mengatakan bahwa tindakan kriminal tidak selalu berkaitan dengan pengguna narkoba. Faktanya, banyak dari pelaku kriminal yang tidak menggunakan narkoba. Begitu kira-kira.

“Di luar itu, saya harus meyakinkan mereka dengan beberapa hal, di antaranya pengguna NAPZA perlu akses kesehatan layaknya manusia lainnya. Saya paparkan juga bagaimana pelanggaran HAM sering terjadi,” ujarnya. Ia menambahkan, pemberdayaan pengguna narkoba juga menjadi isu penting yang sering dikemukakannya.

Keringat dan kerja keras Farid dan kawan-kawannya lambat laun berbuah hasil. LPKNN makin dikenal, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di perguruan tinggi maupun kelompok masyarakat lain.

Keikutsertaannya dalam ajang Homeless World Cup (HWC) 2012 di Meksiko adalah titik puncak bagi Farid dalam membuktikan apa yang diperjuangkannya. Ia terpilih menjadi salah satu pemain timnas Indonesia dalam kejuaraan dunia sepak bola jalanan itu. Ia tidak menyalahkan kepercayaan yang diberikan Rumah Cemara selaku mitra nasional HWC di Indonesia.

Seperti diketahui, HWC bukanlah kompetisi sepak bola biasa yang semata-mata mengejar prestasi olahraga. HWC adalah ajang bagi kelompok marginal di masyarakat untuk melakukan perubahan dalam hidupnya. Melalui keikutsertaannya dalam HWC, setiap anggota timnas diharapkan memberi pengaruh dan menjadi agen perubahan dalam mengikis stigma dan diskriminasi yang kerap dialami pengidap HIV maupun pengguna narkoba.

Farid mengaku publikasi media tentang dirinya sebagai anggota timnas Indonesia untuk HWC 2012 telah membuka mata banyak kalangan di Makassar. Para pejabat di lingkungan pemerintahan misalnya, mulai melihat dirinya yang pengguna narkoba, sekaligus ODHA, bisa melakukan sesuatu yang tidak mereka sangka. Stigma itu mulai terbongkar.

“Banyak dari mereka yang lumayan heran karena saya bisa menyelesaikan kuliah. Mereka juga melihat saya dan teman-teman di LPKNN bisa melakukan advokasi terkait hak-hak komunitas kami,” ujarnya mengenang. Ia menuturkan, dukungan dari Biro NAPZA Pemprov Sulsel kala itu

sangat besar. Bahkan Ballata akhirnya dipinjamkan fasilitas bangunan untuk digunakan sebagai kantor sekretariat.

Jerih Payah Berbuah Pengakuan

Seiring waktu, program di LPKNN terus berkembang. Sesuai dengan sejarah pembentukannya, program pengurangan dampak buruk narkoba suntik (*harm reduction*) menjadi kegiatan utama lembaga ini. Mereka menjangkau komunitas pengguna narkoba suntik (penasun) ke berbagai sudut kota Makassar. Para penasun didampingi untuk mendapatkan akses layanan kesehatan sehingga dapat menekan risiko penularan HIV di kalangan mereka.

Dalam menjalankan program, LPKNN bekerja sama dengan sejumlah layanan kesehatan milik pemerintah. Puskesmas Jongaya di Kota Makassar merupakan salah satunya. Puskesmas ini adalah satu dari lima puskesmas yang menjalankan program layanan komprehensif berkesinambungan di Makassar. Dengan demikian, puskesmas ini menyediakan layanan HIV-AIDS mulai dari tes HIV hingga pelayanan obat antiretroviral (ARV) bagi ODHA.



Layanan komprehensif berkesinambungan di Puskesmas Jongaya, Makassar
(Foto: Tri Irwanda)

Puskesmas Jongaya juga menjalankan program *harm reduction* melalui penyediaan layanan alat suntik steril (LASS) dan program terapi rumatan metadon (PTRM). Program ini merupakan bagian dari respon pemerintah secara nasional, mengingat infeksi HIV di kalangan penasun pada tahun 2000-an tergolong tinggi, termasuk di Makassar. Saat itu, penggunaan alat suntik bergantian jadi pemicu tingginya kasus HIV di Indonesia.

Melalui program LASS, penasun dapat memperoleh alat suntik steril untuk konsumsi heroin atau putau. Pada program metadon, penasun diterapi agar mengganti putau yang semula disuntikkan dengan metadon yang diminum. Metadon adalah opioid sintetis berupa sirup. Dengan demikian, risiko penularan HIV dapat ditekan. Kedua program ini dilakukan sepenuhnya melalui pengawasan medis, tidak liar.

Sebagai layanan publik, Puskesmas Jongaya berupaya menyediakan layanan HIV sebaik mungkin. Harapannya, tentu saja dapat berperan menekan kasus penularan HIV di Makassar.

Keterbatasan mereka dalam menjangkau komunitas, terutama penasun untuk mau mengakses layanan sedikit banyak teratasi dengan adanya LPKNM.

Seperti diakui Jusrang, S.Kep, petugas Puskesmas Jongaya, peran LPKNM sangat baik dalam membantu layanan mencapai target kerjanya. “Farid dan teman-temannya yang tahu keberadaan komunitas pengguna narkoba. Mereka juga tahu bagaimana cara mengajak komunitas itu untuk mau datang ke sini,” ujarnya.

Meski tidak spesifik, Jusrang mencontohkan, dari 11 pasien metadon aktif di tempatnya, bisa dipastikan sebagian adalah kontribusi dari LPKNM. Demikian juga dengan mereka yang mengakses layanan HIV.

“Luar biasa yang dilakukan LPKNM ini. Bahkan saya tahu, mereka tidak jarang keluar duit sendiri agar bisa membawa komunitas datang ke puskesmas ini. Rasanya pengorbanan macam itu mustahil dilakukan pihak lain,” kata Jusrang mengungkapkan apresiasinya.

Apa yang diamati Jusrang, dibenarkan oleh Azis Lasabbi, Pengelola Program di KPA Kota Makassar. Baginya, membahas program HIV-AIDS terkait narkoba di Makassar, berarti bicara tentang LPKNM.

“Yang paling signifikan adalah turunnya kasus baru HIV di kalangan penasun di Makassar. Saya berani bilang, Ballata alias LPKNM tentu berperan karena mereka menjalankan program *harm reduction* di sini,” ujarnya.

Penerapan program *harm reduction* di Indonesia yang secara nasional dilakukan sejak 2006 memang terbukti efektif. Menteri Kesehatan, Nila F. Moeleok, pada High Level Meeting of the General Assembly on HIV-AIDS di Markas Besar PBB, New York pada 9 Juni 2016 pernah menyatakan *harm reduction* mampu menurunkan prevalensi HIV pada kelompok penasun di Indonesia, dari 42% pada 2011 menjadi 29% pada 2015.

Azis menambahkan, LPKNM telah berkontribusi besar dalam pengendalian HIV di Makassar, terutama dalam tiga atau empat tahun terakhir. Baginya, intervensi program yang dilakukan LPKNM secara umum telah mengubah perilaku penasun sehingga lebih terjaga kesehatannya.

“Partisipasi tes HIV di kalangan penasun juga cukup bagus. Selain itu, kualitas pendampingan mereka lebih baik karena jumlah penasunnya sekarang memang sudah berkurang. Jadi bisa lebih intensif,” ungkapnya.

Peran petugas lapangan LPKNM dalam mengajak komunitas penasun mengakses layanan kesehatan seperti tes HIV, sedikit banyak terlihat dari hasil penelitian Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2019, di mana Makassar menjadi salah satu lokasi penelitian. Dalam penelitian Kementerian Kesehatan itu, dari 104 penasun yang menjadi responden dan mengikuti tes HIV, sebanyak 63,5 persen karena merasa sakit dan 22,1 persen karena disarankan oleh petugas lapangan. Kedua hal ini jauh lebih banyak dibandingkan faktor alasan lain seperti disarankan petugas (medis) atau keluarga.

Beradaptasi dengan Kecanggihan Teknologi tanpa Melupakan yang Lama

Dalam dua tahun terakhir, LPKNM bekerja sama dengan beberapa lembaga, baik asing maupun lokal. Tercatat dua lembaga internasional menjadi pendukung utama program mereka yakni Mainline Foundation dari Belanda dan Elton John AIDS Foundation dari Inggris. Selain itu, Rumah Cemara menjadi mitra lokal mereka dalam menjalankan program.

Adanya dukungan lembaga donor membuat LPKNM cukup leluasa menjalankan programnya, termasuk dalam hal manajerial. Saat ini, 19 staf bekerja di lembaga yang bekerja untuk program *harm reduction* ini. Mereka memiliki tugas dan posisi masing-masing, mulai dari mengurus administrasi dan keuangan lembaga sampai mengelola program. Secara teknis staf program bertanggung jawab mengelola layanan seperti konseling dan panti rehabilitasi hingga yang sifatnya turun ke lapangan seperti penjangkauan komunitas dan sosialisasi tentang HIV-AIDS atau NAPZA di masyarakat.

Farid Satria mengungkapkan, hingga akhir 2017 saja LPKNM sudah berhasil menjangkau dan memberdayakan 211 klien pengguna NAPZA. “Pemberdayaan yang kami lakukan terukur, misalnya dengan melihat peningkatan kapasitas klien, dengan melihat hasil rehabilitasi, *aftercare*, dan sebagainya,” ujarnya.

Lebih jauh ia menuturkan, fasilitas rehabilitasi pengguna NAPZA di LPKNM pernah mendapat dukungan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) melalui program pemulihan adiksi berbasis masyarakat pada 2009 lalu. Selama dua tahun program berjalan, sebanyak 168 orang tercatat menjadi klien di sana.

Dukungan lain juga diperoleh melalui kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 14 klien rawat inap dan 30 klien rawat jalan mengikuti program rehabilitasi di LPKNM.

Intervensi program pada komunitas pengguna NAPZA yang spesifik tentunya akan semakin berdampak positif manakala lingkungan yang lebih luas, yakni masyarakat umum, memberi dukungan. Bagaimana pun, dukungan dan kepedulian bisa lahir dari pemahaman yang baik tentang HIV-AIDS maupun NAPZA.

Sadar akan pentingnya menjangkau masyarakat yang lebih luas, LPKNM juga melakukan berbagai kegiatan penyuluhan. Dari catatan yang ada, sedikitnya 990-an orang pernah mendapat informasi tentang HIV-AIDS maupun NAPZA.

“Saya dan teman-teman sering diundang bicara di majelis ta’lim, ibu-ibu PKK, atau dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di tingkat kecamatan,” ungkap Farid. Ia menambahkan, dalam berbagai acara seperti itu, LPKNM berupaya memberikan penjelasan tentang HIV-AIDS atau NAPZA yang objektif. Tujuannya, agar pemahaman masyarakat meningkat dan pada gilirannya stigma pada ODHA atau pengguna NAPZA dapat ditekan.

Aktivitas LPKNM yang tinggi dengan dukungan sejumlah lembaga mendapat apresiasi dari banyak pihak. KPA Kota Makassar menilai, dukungan itu menunjukkan para pegiat di LPKNM yang kebanyakan pengguna narkoba mampu mendapatkan kepercayaan dari lembaga lain.

“Saya salut mereka bisa mengubah image penasun. Malahan bisa dapat anggaran dari donor internasional. Padahal, saat ini lembaga lain kesulitan dapat anggaran dari luar,” kata Azis Lasabbi.

Bagaimana keterlibatan LPKNM dalam memperjuangkan kebijakan pemerintah yang lebih baik bagi komunitasnya? Pengelola Program di KPA Kota Makassar itu kembali mengapresiasi keseriusan Farid dan teman-temannya.

“Sepengetahuan kami di KPA, LPKNM saat ini sedang mengupayakan lahirnya peraturan walikota untuk program *harm reduction*,” ujarnya. Menurutnya, selain program *harm reduction*, keberlanjutan program HIV-AIDS yang lebih umum juga sedang diperjuangkan bersama komunitas lain agar dapat dukungan dan anggaran dari Pemkot Makassar.

Komunitas pengguna NAPZA di Makassar, bagaimanapun, telah merasakan manfaat dari berbagai program LPKNM. Sejumlah catatan penting mengemuka dalam sebuah *focus group discussion* di markas mereka awal November 2019 lalu.

Sebanyak delapan peserta mengapresiasi program yang dilakukan LPKNM. Mereka umumnya terdiri dari pengguna NAPZA dan ODHA di Makassar. Bagi mereka, para petugas pendamping dari Ballata atau PKNM telah banyak membantu, terutama dalam mengakses layanan kesehatan.

Ini dialami Ade dan Eman misalnya. Keduanya kini menjadi pasien metadon di salah satu puskesmas. Melalui ketekunan para petugas pendamping Ballata keduanya makin sadar pentingnya terapi agar tetap sehat dan produktif. Kesadaran juga muncul saat informasi tentang risiko penularan penyakit bisa meningkat jika menggunakan alat suntik narkoba bergantian.

Hal senada diungkapkan peserta lainnya, Chymank. Sebagai penasun, ia mengaku sangat terbantu karena sekarang lebih mudah memperoleh alat suntik steril. Tidak perlu lagi bergantian dengan temannya sesama penasun.

Para petugas penjangkau di Ballata tampaknya berhasil membangun satu hal penting kepada komunitas dampungannya, yakni *trust*. Latar belakang mereka yang umumnya mantan pengguna narkoba memudahkan mereka diterima oleh komunitas yang menjadi dampungannya. Dengan modal ini pula berbagai informasi, terutama menyangkut kesehatan pengguna narkoba, bisa efektif tersampaikan.

Seiring kemajuan teknologi, cara berkomunikasi dengan kelompok dampingan pun berkembang. Kecanggihan telepon pintar dimanfaatkan untuk menunjang pekerjaan. Pada Mei 2018 LPKNM menjadi salah satu lembaga yang terpilih untuk bermitra dengan Rumah Cemara dalam menjalankan program “Community-Mobile-Led Harm Reduction Management System” dukungan EJAF. Program ini pada dasarnya merupakan kegiatan manajemen kasus melalui pemanfaatan aplikasi bergerak, KLIK yang dapat diunduh di Google Playstore dan Appstore. Dengan aplikasi ini, konsumen narkoba suntik serta pasangannya dapat terhubung dengan penyedia layanan seperti puskesmas.

Meski belum sepenuhnya sempurna, KLIK telah memberikan manfaat bagi penggunanya. Seperti diakui Mohammad Hasbi (33), seorang penasun dampingan LPKNM, yang merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya.

Ia tinggal di Kabupaten Gowa dan harus menempuh perjalanan paling cepat setengah jam ke kota Makassar untuk mengakses alat suntik steril dari puskesmas. Di tempat ia tinggal belum tersedia layanan yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Selain alat suntik, Hasbi juga dapat teratur menerima obat ARV untuk menekan perkembangan virus HIV dalam tubuhnya. Dengan memanfaatkan aplikasi KLIK, ia dapat memenuhi kebutuhannya karena petugas lapangan LPKNM sigap menindaklanjutinya. Bahkan, saat ia tidak lagi memiliki ponsel karena telah dijual, ia mencari cara agar tetap dapat mengakses aplikasi KLIK.

“Saya pinjam *hape* adik saya. Yang penting biar tetap bisa akses aplikasinya,” ujarnya tertawa. Ia menambahkan, dirinya telah terbuka pada keluarga mengenai kondisi tubuhnya. Ia merasa beruntung karena keluarganya memang mendukung agar dia tetap sehat.

Lain Hasbi, lain lagi Irwan. Pria usia 42 tahun ini menilai berbagai kegiatan yang dilakukan Farid dan rekan-rekannya telah membuat orang di kampungnya mulai terbuka pikirannya dalam menyikapi persoalan narkoba. Mereka tidak lagi seenaknya menghakimi pengguna narkoba.

Baginya, ini semua bermula dari sebuah papan informasi. Ya, semacam mading alias majalah dinding yang ditempelkan di sebuah bangunan. Mading sederhana berukuran sekitar 100 x 80 cm itu sengaja dibuat oleh LPKNN. Isinya beragam, mulai dari informasi dasar tentang bahaya penggunaan narkoba secara ilegal bagi kesehatan hingga soal HIV dan AIDS.

Semua materi yang kebanyakan berbentuk brosur dan leaflet itu ditempelkan hingga menyerupai kumpulan poster. Materi diperoleh dari berbagai sumber. Sebagian membuat sendiri dan sebagian berasal dari mitra kerja. Rumah Cemara salah satunya.



Papan informasi tentang narkoba dan HIV-AIDS di Bonto Duri, Makassar. Media komunikasi yang sederhana dan kuno namun tetap efektif (Foto: Tri Irwanda)

Lokasi mading itu berada di kawasan Bonto Duri, kecamatan Tamalate, sebuah permukiman padat penduduk di Makassar. Siapa sangka, metode penyampaian info dengan papan informasi yang bagi banyak kalangan sekarang dianggap kuno itu ternyata masih efektif.

“Mading itu bikin orang-orang di sekitar kampung saya enggak terlalu negatif lagi melihat para pengguna narkoba. Mereka tahu sekarang, anak-anak itu korban. Yang untung itu bandar,” ujar lelaki dengan empat anak itu.

Menurut Irwan, warga di sekitar tempat tinggalnya juga sekarang lebih tahu tentang kesehatan. “Dulunya *cuek* saja kalau lihat pengguna narkoba yang sakit. Sekarang lebih perhatian dan sering *ngasih* saran agar dibawa ke puskesmas,” katanya.

Lebih jauh Irwan bercerita dirinya dulu adalah pengguna sekaligus pengedar narkoba. Dia tidak peduli dengan soal kandungan zat yang dijualnya. Yang penting barangnya laku. Hingga kemudian dia mulai kenal dengan petugas penjangkau dari Ballata yang sering mondar-mandir di sekitar kampungnya. Mereka memang sering bikin penyuluhan di sana.

“Awalnya sih masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi lama-lama, saya jadi sering baca mading itu. Saya mulai serap isinya. Ada banyak benarnya itu isi mading,” ucapnya mengenang peristiwa satu dua tahun lalu itu.

Dengan berterus terang, ia menyatakan sudah tidak pernah lagi jualan narkoba. Ia kuatir barang yang ia jual kandungan zatnya tidak jelas dan membahayakan kesehatan.

“Malahan saya sekarang nggak mau pake hape. Soalnya sering tergoda kalau ada pesanan yang seringnya lewat hape,” ujarnya tertawa. Meski begitu, ia mengakui sekali dua kali masih pakai narkoba sekedar melepas penat dan rekreasi.

Baginya, Ballata telah mengubah satu hal dalam hidupnya yakni narkoba bukan satu-satunya cara mendapat kesenangan. Ia kini mendapat kesenangan baru saat mengajak anak-anak muda di sekitarnya, yang juga mantan konsumennya, untuk mau bergabung menjadi dampingan Ballata. *****

Kiprah Komunitas Mengatasi HIV-AIDS di Kota Khatulistiwa



Salah satu sudut kota Pontianak yang terus berkembang
(Foto: Tri Irwanda)

Kota Pontianak siang itu cukup terik. Hawa terasa panas dengan embusan angin lembab khas daerah tropis. Kota ini memang persis dilintasi garis khatulistiwa. Berada di tepi barat pulau Kalimantan, Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, kota ini berbatasan dengan Kabupaten Mempawah di utara dan Kabupaten Kubu Raya di selatan.

Sebagai pusat perekonomian dan perdagangan di Kalimantan Barat, Pontianak terus berkembang. Sebanyak 667 ribu lebih penduduk menghuni kota seluas 107 km persegi ini, menyebar di enam kecamatan. Jumlah penduduk ini jauh lebih banyak dibandingkan 13 kabupaten/ kota lainnya di daerah yang sering dijuluki provinsi seribu sungai ini.

Laju perkembangan sebuah kota tentu melahirkan sejumlah persoalan yang lebih kompleks, termasuk dalam hal kesehatan warganya. HIV-AIDS salah satunya. Saat ini, Pontianak adalah kota dengan temuan kasus HIV-AIDS tertinggi di Kalimantan Barat.

Data Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan, dalam kurun waktu empat tahun saja (2015 hingga 2018) secara kumulatif jumlah temuan kasus HIV mencapai 531 kasus. Kebanyakan berasal dari penularan secara seksual, terutama pada kalangan heteroseksual.

“Masalah HIV-AIDS saat ini cukup menjadi perhatian pemerintah Kota Pontianak,” ucap Lusi Nuryanti, Pengelola Program di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak. “Ini terlihat dari anggaran dalam APBD Kota yang meningkat dibanding tahun sebelumnya,” lanjutnya.

Lusi membuka percakapan siang itu menyambut kunjungan tim Rumah Cemara di kantornya yang berada di kompleks Dinas Kesehatan Kota Pontianak, pertengahan November 2019. Selain

perwakilan Dinkes Kota Pontianak, beberapa staf KPA Kota Pontianak pun hadir dalam diskusi saat kunjungan kami siang itu.

Menurut Lusi, anggaran dari APBD untuk KPA Kota Pontianak tahun lalu hanya berkisar 400 juta rupiah, namun tahun ini meningkat menjadi hampir 600 juta rupiah. "Ini bisa jadi cermin dari kepedulian pemerintah kota terhadap permasalahan HIV-AIDS di sini," tuturnya.

Sesuai perannya, KPA Kota Pontianak menjadi koordinator untuk berbagai program seputar penanggulangan HIV-AIDS. Saat ini ada lima staf bekerja di sana. Sebelumnya, jumlah staf yang bekerja jauh lebih banyak mencapai 16 orang. Namun perubahan dilakukan setahun terakhir untuk mengikuti struktur di tingkat provinsi yang jauh lebih ramping.

Salah satu bagian penting dalam upaya mengendalikan epidemi HIV-AIDS adalah tersedianya layanan kesehatan bagi orang dengan HIV-AIDS (ODHA). Perkembangan positif terjadi di Pontianak dengan adanya rencana perluasan layanan pengobatan antiretroviral (ARV) bagi ODHA.

"Insya Allah ke depan (tahun 2020-pen), akan dibuka lagi lima layanan ARV di puskesmas. Jadi, akan ada enam puskesmas nanti yang bisa memberi layanan ARV di Pontianak," ungkap Ridwansyah, SKM, Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Pontianak.

Menurutnya, penambahan jumlah fasilitas layanan kesehatan ini tidak terlepas dari upaya pemerintah mengendalikan HIV-AIDS. Selain itu, beberapa program juga sedang disiapkan untuk menangani pengobatan bagi pasien pengidap hepatitis C.

Semangat Positif dari Komunitas

Ada satu nama yang sering disebut sejumlah pihak saat membahas HIV-AIDS di Pontianak. Nama itu Teddy Subarta. Pria berusia 47 tahun itu sejak awal 2000-an telah berkecimpung dalam program pengendalian epidemi ini, terutama di kota kelahirannya, Pontianak.

Teddy bersama komunitas pegiat HIV-AIDS lainnya aktif menyuarakan pentingnya semua kalangan untuk lebih peduli pada persoalan HIV-AIDS di Pontianak. Ia tergabung dalam Yayasan Pontianak Plus, sebuah lembaga yang bekerja untuk pendampingan ODHA. Sebelumnya, ia bekerja di KPA Provinsi Kalimantan Barat.

Terbentuknya Pontianak Plus tidak terlepas dari lahirnya kelompok dukungan sebaya (KDS) di Pontianak pada 2003 silam. "Awalnya ada dorongan dari Yayasan Spiritia, agar di sini dibentuk KDS. Gunanya untuk memberikan dukungan dan berbagi informasi kepada sesama orang dengan HIV-AIDS, terutama yang baru mengetahui statusnya. Sebagai *peer support gitu lah*," ungkapnya mengenang.

Saat itu, informasi tentang HIV-AIDS terbilang sangat minim di Pontianak. ODHA seringkali tidak tahu harus ke mana untuk mencari informasi.

Waktu berjalan, KDS ini terus berkembang. Dukungan sejauh itu baru dari Yayasan Spiritia saja, termasuk untuk menyewa sebuah tempat sekretariat. Teddy dan teman-temannya terpikir melangkah lebih jauh untuk mengembangkan programnya.

"Aspek legalitas sebuah organisasi kami selesaikan. Terbentuklah Yayasan Pontianak Plus, meskipun dukungannya baru dari Spiritia saja," ujarnya. Saat ini, yayasan itu memiliki nama resmi Lembaga Kemanusiaan Pontianak Plus.

Ia melanjutkan, dukungan dari sejumlah lembaga kemudian berdatangan. Pada 2010 misalnya, The Global Fund mulai memberikan dukungannya. Lalu pada 2013, lembaga internasional seperti Hivos dan HCPI turut membantu program yang dilakukan Pontianak Plus. Demikian juga dukungan dari Colombo Plan mereka terima.

Dukungan pemerintah, melalui Kementerian Sosial mereka peroleh untuk program rehabilitasi narkoba. Panti rehabilitasinya berada di Graha Rahayu. Pada awal 2010-an itu memang terjadi lonjakan kasus HIV akibat pemakaian alat suntik secara bergiliran di kalangan pengguna narkoba. Pontianak Plus turut mengembangkan program *harm reduction* merespon perkembangan epidemi HIV-AIDS di sana. Selain menjalankan penjangkauan dan pendampingan untuk ODHA dan pasangannya, program kerja pun ditujukan bagi pengguna narkoba.

Teddy bekerja secara resmi di Pontianak Plus sebenarnya baru pada 2018, saat Rumah Cemara menjalin kerja sama dengan mereka untuk menjalankan program dukungan Elton John AIDS Foundation (EJAF), sebuah organisasi nonpemerintah Inggris. Ia menjadi penanggung jawab dalam program tersebut.



Tim Rumah Cemara berdiskusi dengan para pegiat HIV-AIDS di Sekretariat KPA Kota Pontianak (Foto: Faisyal Sjahrial)

Salah satu program yang didukung EJAF adalah kegiatan manajemen kasus melalui pemanfaatan teknologi aplikasi bergerak bernama KLIK. Aplikasi ini dapat diunduh di Google Playstore dan Appstore. Dengan aplikasi ini, orang yang ingin mendapat pelayanan kesehatan dan informasi dapat terhubung dengan penyedia layanan seperti puskesmas.

Keberadaan dan semangat yang dimiliki Teddy dan teman-temannya di Pontianak Plus seakan memberi gairah baru pada KPA Kota Pontianak. Dalam program *harm reduction* misalnya. Sejak 2015, program yang ditujukan untuk menekan kasus penularan HIV di kalangan pengguna narkoba suntik ini bisa dikatakan vakum di Pontianak. Tidak ada lagi dukungan lembaga donor. Namun, melalui dukungan Rumah Cemara, Pontianak Plus saat ini kembali menggerakkan sejumlah kegiatan, termasuk dalam mengadvokasi pemerintahan.

Seperti diakui Lusi, upaya advokasi yang dilakukan Pontianak Plus memancing gairah berbagai pihak untuk kembali bekerja sama. “Seperti dalam upaya advokasi anggaran, teman-teman di *stakeholder*, khususnya KPA Kota Pontianak kembali bersemangat melakukan advokasi bersama,” ujarnya.

Menurutnya, advokasi yang ditujukan agar Pemkot Pontianak menyediakan anggaran untuk kebutuhan ODHA dan pengguna narkoba berlangsung lancar. Pemkot telah mengeluarkan SK Walikota yang isinya menyetujui adanya PBI (penerima bantuan iuran) bagi ODHA dalam mengakses BPJS Kesehatan. Anggaran KPA Kota Pontianak pun meningkat yang semula sekitar 400 juta rupiah setahun, sekarang menjadi sekitar 600 juta rupiah.

”Ini tentunya hasil dari advokasi bersama antara Pontianak Plus bersama KPA Kota Pontianak,” ucapnya bangga.

Kebijakan untuk meringankan beban berobat bagi ODHA ini telah berlangsung sejak 2018. Sejumlah ODHA beserta keluarganya dalam satu KK (kartu keluarga) telah menerima bantuan iuran PBI BPJS kesehatan melalui APBD Kota Pontianak. Selain BPJS Kesehatan gratis, Pemkot Pontianak melalui dinas sosial juga memberikan dukungan berupa modal bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi ODHA yang memiliki usaha. Sebanyak 11 orang telah merasakan manfaatnya.

Capaian lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah lahirnya Kesepakatan Bersama tentang Penanggulangan HIV dan AIDS melalui Pengurangan Dampak Buruk Pada Pengguna NAPZA. Kesepakatan itu dibuat oleh Lembaga Kemanusiaan Pontianak Plus, Pemprov Kalbar, Pemkot Pontianak, dan Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Kalbar pada 25 September 2019.

Dalam kesepakatan yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi HIV pada pengguna NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) ini, tercantum sejumlah kesepakatan mulai dari pembentukan pokja pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA, penyediaan layanan *biomedical*, *behavioral*, dan *structural* yang berbasis aplikasi, hingga sosialisasi dan soal pembiayaannya.

Melalui kesepakatan yang turut ditandatangani langsung oleh Gubernur Kalbar dan Walikota Pontianak ini, diharapkan kerja sama program pengurangan dampak buruk konsumsi NAPZA memiliki dasar pelaksanaannya.

Komunikasi tampaknya menjadi faktor penting yang membuat Teddy dan komunitas pegiat HIV-AIDS di Pontianak dapat mendorong sejumlah pihak mau bahu-membahu mengatasi epidemi ini. Hubungan baik yang terjalin menjadi penentu.

Fasilitas yang Sudah Tersedia Belum Banyak Terpakai

Kebijakan yang mulai berpihak pada komunitas orang dengan HIV-AIDS atau yang terdampak HIV menjadi angin segar. Kebijakan yang mengakomodasi kepentingan komunitas tentu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Dalam hal program PBI BPJS Kesehatan, KPA Kota Pontianak telah memfasilitasi ODHA agar mudah mengakses layanan kesehatan secara cuma-cuma.

“Sekarang sudah enak. Teman-teman ODHA tinggal datang saja ke KPA. Cukup menyerahkan fotokopi KTP dan kartu keluarga. Nggak perlu ada survei, yang penting kami tahu ada yang positif HIV. Langsung bisa kami sampaikan ke Yanmedik di Dinkes. Jadi dilihat dari prosesnya sudah sangat enak,” ungkap Lusi.

Namun sayangnya, hambatan muncul justru dari sisi komunitas sendiri. Dari penuturan Lusi, yang mendaftarkan diri untuk mengakses PBI sejauh ini baru 20 orang saja. Padahal menurutnya, KPA Kota Pontianak telah berhasil melobi DPRD agar kuota untuk peserta PBI BPJS Kesehatan ditambah menjadi 100 orang.

“Tapi justru kok mereka sepertinya nggak minat ya? Yang masuk cuma 20-an orang. Sayang sekali. Kayaknya, masih ada kekhawatiran deh, terutama di kalangan pengguna narkoba saat diminta KK dan KTP,” ucapnya setengah mengeluh. Ia juga menduga, kecilnya minat ODHA mengakses PBI ini karena menilai layanan melalui BPJS ini jelek.

Topik soal minat komunitas mendaftarkan diri menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan juga terungkap dalam sebuah diskusi di *community-based care* yang dikelola Pontianak Plus. Di tempat yang biasa digunakan oleh komunitas untuk melakukan pertemuan kelompok ini, berlangsung sebuah *focus group discussion*, Rabu (13/11/2019). Pesertanya berasal dari perwakilan populasi kunci di Pontianak.

Sebagian peserta mengakui, meskipun prosedur untuk mendaftarkan diri menjadi peserta PBI telah sangat mudah, namun masih ada rasa malas mengurus administrasinya. Selain itu, beberapa peserta mengaku terkendala dengan pengurusan surat keterangan miskin dari pemerintah setempat.

Keberlanjutan Program Jadi Tantangan

Diskusi dengan komunitas saat itu juga membahas beberapa isu penting seputar konsumsi narkoba terkini di Pontianak. Konsumsi sabu dengan cara disuntikkan sedang menjadi tren di sana. Banyak alasan yang diungkapkan, mulai dari keyakinan bahwa dengan cara disuntik menjadi lebih hemat, hingga adanya keinginan mendapat sensasi. Ya, sensasi untuk membangkitkan romantika saat masih menyuntik heroin di masa lalu.

Risiko penularan penyakit akibat bergantian memakai alat suntik terkadang tidak diindahkan. Beruntung, di Pontianak telah lama berdiri lembaga yang menjangkau mereka seperti West Borneo Action yang memang menjalankan program untuk *harm reduction*. Selain itu, tentu saja ada Yayasan Pontianak Plus.

“Pontianak Plus itu sangat bermanfaat. Saya jadi tahu ada program metadon atau program LASS (layanan alat suntik steril-pen) buat kita. Kalau nggak ada mereka, saya nggak akan tahu kalau tukar-tukaran jarum (suntik) itu bahaya,” ujar DR (34), seorang pengguna narkoba yang hadir dalam diskusi siang itu. Ia dapat informasi keberadaan Pontianak Plus dari teman-temannya, sesama konsumen narkoba.

Hal serupa disampaikan RK (29), istri DR yang juga konsumen narkoba. Menurutnya, para petugas di Pontianak Plus sangat membantu. “Bahkan dulu itu saya sama sekali nggak tahu apa-apa soal kesehatan. Yang penting *pake*. Dulu itu saya harus ke tempat bandarnya dulu, barulah dapat jarum suntik. Itu juga kita harus beli, satunya lima ribu rupiah,” terangnya.

Masalahnya, menurut pasangan suami istri beranak dua itu, suntikan dari tempat bandar tidak selamanya tersedia. Akibatnya, terkadang mereka sering menggunakan suntikan bekas bergantian dengan teman-temannya. Mereka kemudian sadar akan bahaya berbagi suntikan dari penyuluhan Pontianak Plus yang belakangan sering diikuti. DR dan RK beruntung, keduanya didiagnosis tidak terinfeksi HIV saat melakukan tes.

Keduanya serempak mengatakan, jauh di dasar hatinya ingin cepat berhenti menggunakan narkoba. Saat ini mereka mengaku menggunakan narkoba, khususnya sabu rata-rata tiga hari sekali. Ini sudah jauh berkurang ketimbang sebelum dikarunia anak, yang menurutnya bisa setiap hari.

“Pingin banget berhenti. Apalagi lihat teman-teman yang sudah *clean gitu*, iri rasanya. Kok dia bisa sukses...kok saya susah,” ujar DR yang juga bekerja sambilan sebagai tukang parkir itu.

Bukan hanya bagi DR dan RK, susahya melepaskan diri dari kecanduan zat juga dirasakan teman-temannya. Terlepas dari soal itu, masalah kesehatan menjadi perhatian utama mereka saat ini. Meski masih berkuat dengan konsumsi narkoba, dan tidak sedikit yang telah terinfeksi HIV, mereka tetap memiliki keinginan untuk sehat. Mereka memerlukan panduan untuk mempertahankan kesehatan tubuhnya.

Aplikasi KLIK yang diperkenalkan Pontianak Plus menjadi terobosan baru. Melalui penerapan teknologi kekinian, komunitas populasi kunci di Pontianak yang umumnya juga pengguna *smart phone* merasakan manfaatnya. Banyak informasi yang dapat mereka akses, mulai dari informasi fasilitas layanan kesehatan seperti pengobatan, hingga konsultasi hukum. Kemudahan dan privasi yang cukup terjaga tampaknya menjadi daya tarik bagi mereka untuk mengakses aplikasi yang didukung EJAF melalui Rumah Cemara ini.

Namun sayangnya, mereka merasa respon dari admin atau pengelola KLIK masih terbilang lambat, terutama saat menjawab pertanyaan.

“Jawabannya sering lama, bisa berhari-hari kalau ditanya tentang satu informasi,” ujar Kiki, salah seorang pengguna KLIK. Ia berharap, pengelola KLIK dapat lebih responsif menjawab kebutuhan informasi komunitas yang menjadi pengguna aplikasi itu.

Tingginya minat komunitas dalam mengakses informasi kesehatan diakui Teddy Subarta. Ia menilai, keberadaan sebuah lembaga yang bisa memenuhi kebutuhan informasi bagi komunitas menjadi hal penting. Namun di sisi lain, ia sedang berpikir keras tentang satu hal, yakni keberlanjutan sebuah lembaga beserta program kerjanya.

“Saya dan teman-teman sedang galau juga memikirkan *sustainability* program HIV atau *harm reduction* di sini,” terangya. Bagaimanapun, ia menyadari, dukungan lembaga donor tentu memiliki batas waktu. Tidak selamanya ada.

“Sekarang masih ada EJAF, Rumah Cemara, dan yang lainnya. Tapi kan mereka nggak akan selamanya *ngasih* dukungan,” lanjutnya. Ia ingin melakukan sesuatu agar program yang telah berjalan baik di kota tempat ia tinggal bisa terus berlanjut.

Baginya, program akan berkelanjutan jika ada dukungan dari Pemkot Pontianak. Ya, dukungan penganggaran melalui APBD. “Makanya, saya ingin belajar dari beberapa lembaga atau organisasi kemasyarakatan seperti MUI, atau Pemuda Pancasila misalnya. Mereka kan bisa dapat anggaran rutin dari APBD,” ucap pria yang sempat kuliah di Bandung itu bersemangat.

Mimpi Teddy adalah harapan bagi mereka yang terdampak HIV-AIDS di Pontianak. Cita-cita yang memerlukan kerja keras untuk mewujudkannya. Selain, tentu saja, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak yang serius untuk menekan laju epidemi HIV-AIDS di kota yang terkenal dengan keelokan sungai bernama Kapuas itu. *****

Menekan Stigma LGBT dengan Berbaur di Masyarakat



GOR Bulu Tangkis di RW 06 Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kertajaya, Surabaya menjadi arena perekat komunitas GAYa Nusantara dan Warga Setempat (Foto: Faisyal Sjahrial)

Jangan bilang Anda pernah ke Surabaya jika belum ke Tunjungan Plaza. Ya, mall besar pertama di Surabaya itu memang ikonik. Berdiri sejak 1986, mall itu telah diakui menjadi salah satu tujuan wisata di kota buaya itu.

Namun tujuan saya kali ini bukan berwisata. Saya dan seorang rekan dari Rumah Cemara, Faisyal Sjahrial, bertandang ke sebuah bangunan yang lokasinya berada di belakang Tunjungan Plaza. Cukup berdekatan. Tempat itu adalah Puskesmas Kedungdoro, di Jalan Kaliasin Pompa, Surabaya, sekitar 300 meter dari mall ikonik itu.

Puskesmas Kedungdoro siang itu dipenuhi sejumlah pasien yang berkerumun di ruang tunggu. Sebagian lagi menunggu antrean di luar halaman. Maklum, saat kami berkunjung, beberapa ruangan di sana sedang direnovasi.

Ada satu ruangan di lantai dua gedung itu yang dinamakan Ruang Biru. Warna biru memang mendominasi ruangan itu.

“Di Ruang Biru ini kami melayani konseling dan tes HIV. Pengobatan bagi pasien HIV juga kami lakukan di sini,” ucap dr. Rr. Endang Dwihastutiningsih, Kepala Puskesmas Kedungdoro.



dr. Rr. Endang Dwiastutiningsih, Kepala Puskesmas Kedungdoro, Surabaya (tengah) didampingi Nuke Nofitasari menerima kunjungan Rumah Cemara (4/12/2019) (Foto: Faisyal Sjahrial)

Puskesmas Kedungdoro mulai menjalankan program HIV dan IMS (Infeksi Menular Seksual) sejak 2013. Namun baru empat tahun kemudian, puskesmas ini mulai menjalankan program Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) secara lengkap. Hingga kini, setidaknya 99 pasien HIV yang aktif mengakses layanan puskesmas ini, termasuk dalam hal pengobatan ARV.

“Kalau secara keseluruhan sih, bisa lebih dari dua ratusan pasien umum kami layani setiap hari. Cukup banyak,” ujar dr. Endang melanjutkan. Menurutnya, banyaknya pasien yang datang belum seimbang dengan tenaga yang melayani. Ia mencontohkan, staf yang bertugas di laboratorium hanya satu orang sehingga ada kalanya kecepatan pelayanan sedikit terhambat.

Meski demikian, ia dan stafnya berusaha sebaik mungkin melayani masyarakat. Ia kembali mencontohkan, pasien saat ini harus mendaftar secara online sehingga bisa datang sesuai jam antreannya. Namun sering ditemui pasien yang langsung datang tanpa daftar sebelumnya.

“Kami maklumi, karena memang belum memasyarakat informasinya. Belum semuanya tahu. Belum setahun,” ucapnya. Ia melanjutkan, pihaknya melakukan cara khusus agar pasien tidak terbengkalai lama.

“Bagi pasien dengan KTP Surabaya dan sudah beberapa kali datang mengakses layanan, akan ada petugas yang memotong jalurnya sehingga bisa langsung dilayani. Tapi, tentu saja tidak merugikan mereka yang memang sudah daftar online. Kami di sini *kompakan*,” ujarnya menjelaskan.

Perhatian pada pasien tampaknya menjadi salah satu kelebihan Puskesmas Kedungdoro. Hal ini pula yang membuat puskesmas ini akrab dengan populasi kunci di Surabaya. Populasi Kunci adalah kelompok di masyarakat yang perlu aktif berperan sehingga dapat menjadi kunci atau penentu keberhasilan program penanggulangan HIV-AIDS.

“Kami tidak membeda-bedakan pasien. Mau dia waria, pemakai narkoba, gay, atau siapa pun, kami layani,” ungkap Nuke Nofitasari, staf Puskesmas Kedungdoro yang siang itu mendampingi dr. Endang menemani kami.

Kesehatan adalah Hak Universal Semua Orang

Nuke Nofitasari sendiri mulai mengenal komunitas yang aktif dalam bidang HIV-AIDS pada 2013. Sebelumnya, ia sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan komunitas itu. Melalui perkenalannya dengan para pegiat HIV-AIDS di Yayasan GAYa Nusantara, ia mulai mendalami isu kesehatan di berbagai komunitas, termasuk di komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT).

“Saya sering sok akrab saja dengan mereka biar dekat. Akhirnya, saya jadi lebih memahami mereka,” ungkapnya. Ia melanjutkan, dirinya sering mendapat pelajaran berharga saat berinteraksi dengan komunitas. Dari yang sepele sampai yang sangat serius, seperti soal penanganan kasus IMS pada gay atau waria.

“Saya jadi tahu, teman-teman waria itu lebih nyaman dipanggil mbak. Dulu, saya pernah ditegur seseorang karena memanggil pasien waria dengan sebutan mas. Kebetulan dia lagi nggak dandan. Sepele ya, tapi itu jadi pelajaran penting buat saya dalam berkomunikasi,” ujarnya sambil tertawa.

Perempuan yang mengenyam pendidikan kebidanan itu menuturkan, kedekatannya dengan komunitas membuat ia terlibat aktif membantu terbentuknya Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) di puskesmas itu. KDS bagi orang dengan HIV-AIDS itu terbentuk pada 2015.

“Waktu itu, saya mikir, kok tambah banyak saja kasus HIV ini. Kasihan, kalau semua orang dengan HIV tertutup semua, *gimana* jadinya. Saya perlu orang yang bisa terbuka. Dia bisa jadi contoh orang HIV itu bisa tetap sehat,” tambahnya.

Menurutnya, keanggotaan di KDS itu sifatnya umum. Ada dari kalangan LGBT, ada penasan, anak dengan HIV, dan ada juga yang menjadi pasangan orang dengan HIV. Seperti di tempat lain, KDS di Puskesmas Kedungdoro menjadi tempat berbagi informasi, pengalaman, dan saling menguatkan anggotanya satu sama lain. Pertemuan bulanan mereka lakukan secara rutin, pada minggu ketiga setiap Jumat sore.

Layanan perawatan, dukungan, serta pengobatan menjadi bagian penting dalam meredam laju kasus HIV-AIDS di Indonesia, termasuk di Surabaya. Seperti diketahui, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI pada Februari 2020 melaporkan, sejak 2005 hingga akhir 2019, jumlah kumulatif kasus HIV di Indonesia mencapai 377.564 kasus. Jumlah temuan kasus ini baru mencakup sekitar 59 persen dari perkiraan jumlah keseluruhan kasus yang mencapai 640.443 kasus. Sementara itu, jumlah kasus AIDS dilaporkan relatif stabil setiap tahunnya, dengan jumlah mencapai 121.101 kasus di Indonesia.

Upaya meredam laju kasus HIV-AIDS memang mensyaratkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak, termasuk antara penyedia layanan kesehatan dan komunitas populasi kunci. Di Surabaya, Yayasan GAYa Nusantara menjadi bagian dari upaya itu.

Lalu, siapakah Yayasan GAYa Nusantara?

GAYa Nusantara merupakan organisasi nirlaba yang lahir pada awal Agustus 1987 di Surabaya. Kemunculannya pada saat itu menjadikan GAYa Nusantara sebagai pelopor organisasi gay di Indonesia. Organisasi ini didirikan Dede Oetomo, seorang sosiolog yang juga aktivis gay, untuk

memperjuangkan hak-hak LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender/ Transsexual, Intersexual, dan Queer).

Organisasi yang tidak mempermasalahkan keragaman seks, gender dan seksualitas serta latar belakang lainnya ini kemudian resmi menjadi sebuah yayasan bernama Yayasan GAYa Nusantara. Pengesahan yayasan secara resmi diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM RI pada 27 Juni 2012.

Seiring waktu, isu HIV/AIDS, khususnya pada komunitas populasi kunci, menjadi perhatian dari Yayasan GAYa Nusantara. Boleh dibilang, perhatian ini sekaligus sebagai respon atas tingginya kasus HIV di kalangan populasi kunci yang menjadi dampingan Yayasan GAYa Nusantara.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pernah menyampaikannya dalam Laporan Kajian Nasional Respon HIV di Bidang Kesehatan Republik Indonesia tahun 2017. Laporan itu mengindikasikan, meski secara keseluruhan penularan heteroseksual tetap menjadi moda penularan utama, namun sejak tahun 2011 terjadi peningkatan persentase temuan kasus HIV sebesar lima kali lipat untuk kelompok populasi kunci Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL).

Situasi serupa terjadi di Surabaya saat ini. Kasus infeksi HIV di kalangan waria atau LSL di Surabaya memang masih terbilang tinggi. Hal ini terlihat dari laporan Kemenkes RI mengenai jumlah tes HIV dan hasilnya pada kelompok risiko pada 2019. Untuk kota Surabaya, data menunjukkan, dari 157 waria yang mengikuti tes HIV, sebanyak 10 orang dinyatakan positif HIV. Sementara itu, dari 1.498 LSL yang dites HIV, tercatat 238 orang positif HIV, yang berarti hampir 16 persennya. Jumlah ini jelas melebihi kasus pada kelompok lain, misalnya pada pengguna narkoba suntik (6 persen) dan wanita pekerja seks (5 persen).

Dalam konteks ini, keberadaan GAYa Nusantara, demikian selanjutnya kita sebut, sangat membantu program puskesmas. Baik dr. Endang maupun Nuke mencontohkan, para petugas dari GAYa Nusantara sangat aktif membawa komunitas dampingannya untuk memeriksakan diri di Puskesmas Kedungdoro. Selain itu, GAYa Nusantara juga tidak jarang membantu puskesmas dalam berbagai kegiatan penyuluhan HIV-AIDS yang digelar oleh Komisi Penanggulangan AIDS di tingkat kecamatan atau oleh Warga Peduli AIDS.

Isu kesehatan, terutama HIV-AIDS sengaja diambil GAYa Nusantara sebagai salah satu strategi untuk menekan stigma alias cap buruk yang melekat pada komunitas LGBT. Bagaimana pun, mereka sadar, resistensi, sekecil apapun, terhadap keberadaan komunitas LGBT tetap ada di sebagian masyarakat.

“Kami tidak langsung masuk dari soal LGBT. Kami masuk dari soal HIV-AIDS. Karena kan informasi tentang pencegahan HIV-AIDS itu perlu jadi perhatian semua orang,” ungkap ketua Yayasan GAYa Nusantara yang namanya akrab dipanggil Mak Vera. Setelah itu, lanjutnya, barulah setahap demi setahap mengupas masalah yang lebih dalam seperti soal hak kesehatan seksual dan reproduksi, atau mengenai Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Body (SOGIEB). Dengan cara seperti itulah program kerja sama dengan Rumah Cemara melalui dukungan PTCH dijalankan.

PITCH atau Partnership to Inspire, Transform and Connect the HIV Response adalah program advokasi kolektif yang dijalankan Rumah Cemara melalui kemitraan strategis dengan sejumlah organisasi komunitas di Indonesia, salah satunya dengan GAYa Nusantara. Secara sederhana, PITCH bertujuan menciptakan kebijakan yang mendukung respon terhadap HIV-AIDS dan pemenuhan hak-hak populasi kunci, terutama LGBTIQ dan konsumen narkoba. Program ini didukung oleh konsorsium International HIV-AIDS Alliance, Aidsfonds, dan Kementerian Luar Negeri Belanda.

Mak Vera juga menjelaskan, sejauh ini cara yang ditempuh cukup efektif dalam menekan resistensi masyarakat terhadap keberadaan mereka. Bahkan, undangan untuk mengisi acara penyuluhan HIV-AIDS di masyarakat datang silih berganti.



Faisyal Sjahrial dari Rumah Cemara (kanan) berdiskusi dengan Mak Vera (kiri) dan Ayah Tono (tengah) di sekretariat GAYa Nusantara, Surabaya (Foto: Tri Irwanda)

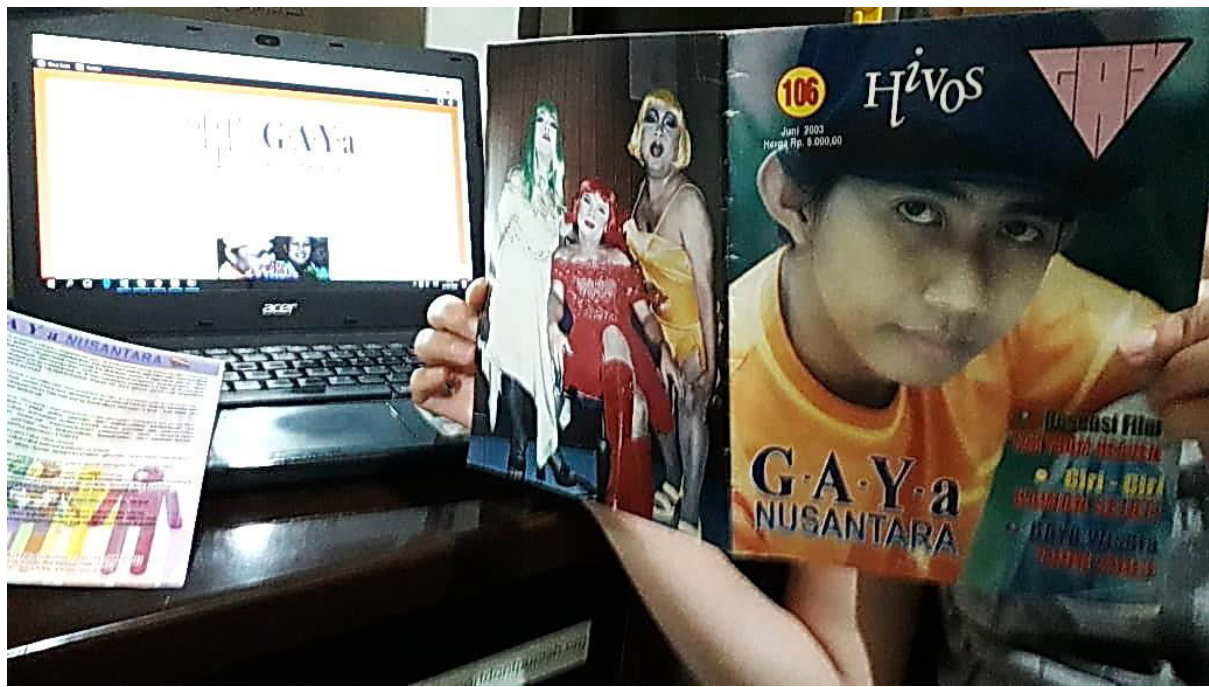
Melawan Stigma dengan Pergaulan Inklusif di Masyarakat

Sebagai organisasi, GAYa Nusantara telah berusia 32 tahun. Sebuah perjalanan yang tidak sebentar dan tentunya penuh dinamika mengingat latar belakang wilayah kerjanya yang sensitif yakni LGBT.

Dari sejarahnya, GAYa Nusantara dibentuk tidak terlepas dari adanya kebutuhan komunitas gay untuk memiliki wadah berkumpul, berteman, dan berinteraksi. Untuk menyalurkan hobi pertemanan di antara komunitasnya, mereka mencetak majalah bernama GAYa Nusantara berupa buletin atau *newsletter* yang berisi tentang beragam hal.

Suhartono, Koordinator Program Yayasan GAYa Nusantara menuturkan saat itu komunitas memerlukan media yang menjadi jembatan informasi sesamanya. Isinya berupa hal-hal bersifat ringan mulai dari ramalan bintang, cerpen, puisi, atau kisah inspiratif sosok gay yang memang sudah berani membuka statusnya.

“Yang paling menarik perhatian saat itu adalah rubrik perkawanan. Bayangkan, dulu kan belum ada media sosial. Jadi, rubrik untuk menjalin perkawanan lewat surat-suratan macam itu sangat diminati,” ujar pria yang biasa dipanggil Ayah Tono itu mengenang.



Pada masanya, majalah GAYa Nusantara adalah media efektif bagi komunitas LGBT dalam berbagi informasi (Foto: Tri Irwanda)

Menurutnya, majalah GAYa Nusantara saat itu terbit tiga bulan sekali. Namun karena peminatnya banyak, adakalanya majalah diterbitkan sebulan sekali. Majalah ini terus berkembang hingga sirkulasinya tidak hanya di Surabaya, melainkan ke kota-kota lain seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Bahkan majalah ini juga bisa diperoleh di beberapa tempat di luar Jawa seperti di Bali dan Jambi. Isinya pun saat itu semakin beragam dengan mulai masuknya informasi kesehatan seperti HIV/AIDS.

Untuk mawadahi kebutuhan pertemanan sesama komunitas ini, mulai 1993 GAYa Nusantara cukup rutin menggelar *open house*. Acara ini semacam “kopi darat” agar komunitas lebih akrab satu sama lain. Jaringan kerja mereka pun semakin luas, terlihat dari bermunculannya organisasi sejenis di wilayah lain seperti GAYa Priangan di Bandung, GAYa Celebes di Makassar, atau GAYa Dewata di Denpasar.

Lalu, bagaimana bisa sebuah organisasi yang secara terbuka memperjuangkan keberagaman identitas gender seperti LGBT, bisa terus berkembang tanpa penolakan dari masyarakat sekitarnya?

Mak Vera menjelaskan, GAYa Nusantara dengan sadar “bermain” di bawah dulu yakni di *level* masyarakat. “Kami bermain di akar rumput dulu, karena kan yang setiap hari ada dan bersinggungan dengan kita adalah mereka. Para pembuat kebijakan seperti pemerintah kan adanya di atas, tidak bersama kami. Jadi, kalau di bawah kuat, tidak mungkin ada yang mengusik kami,” ujarnya menerangkan.

Senada dengan itu, Ayah Tono menambahkan secara naluriah, komunitas di GAYa Nusantara merasa perlu bergaul dengan masyarakat sekitar. Berbagai kegiatan di masyarakat mereka ikuti dan sebaliknya saat GAYa Nusantara mengadakan acara di sekretariat, masyarakat sekitar juga diundang untuk turut serta meramaikan acara.

“Alhamdulillah, hubungan kami sangat baik,” ujarnya. Ia mencontohkan, pada 2012 lalu terjadi persekusi yang dilakukan sebuah ormas keagamaan terhadap kantor sekretariatnya. “Yang

membela dan melindungi kami justru masyarakat sekitar. Bahkan pak RT yang turun tangan langsung melindungi kami dengan mengatakan bahwa kami adalah warganya. Ia bilang, dirinya yang bertanggungjawab,” ungkapnya bersemangat.

Melalui upaya seperti di atas, GAYa Nusantara berhasil membuktikan bahwa sikap inklusif adalah hal penting untuk dilakukan agar keberadaan komunitas diterima di masyarakat. Sikap dan cara inklusif ini juga yang terlihat dari sebuah kegiatan rutin mereka: bulu tangkis!

Ya, setiap minggu komunitas GAYa Nusantara memiliki jadwal rutin bermain bulu tangkis di sebuah GOR di Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng Kertajaya, Surabaya. Di tempat itu, olah raga bulu tangkis menjadi perekat kebersamaan mereka. Semuanya berbaur, bergembira, tanpa sekat identitas gender atau orientasi seksual.

Hal ini pula yang disampaikan Dyah Susilawati (51), seorang ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar GOR bulu tangkis itu. Berbincang di sela-sela menyaksikan komunitas berlatih bulu tangkis, ia mengatakan dirinya dan warga sekitar tidak pernah membedakan orang dari latar belakangnya.

“Ya sama saja ya, mau dia gay, mau waria, ya sama saja manusia. Kami tidak membedakan-bedakannya,” ucapnya tersenyum. “Kami rukun-rukun saja dengan teman-teman ini. Bahkan kami senang, kan mereka kalau lagi main bulu tangkis suka heboh. Lucu jadinya,” ujarnya sambil tertawa.

Perempuan yang akrab dipanggil Susi ini mengaku tidak pernah merasa risih bergaul dengan komunitas gay maupun waria. “Apalagi mereka itu baik semua kok sama saya. Kenapa saya harus jahat ke mereka?” lanjutnya.

Meski demikian, ia mengaku dalam hati pernah berharap teman-temannya itu kembali ke jati diri aslinya, yang semula.

“Dulu sih pernah berharap mereka kembali ke warna aslinya, *gitu*. Namun, ya mereka sudah terbentuk seperti sekarang. Ya, itu sudah takdirnya mungkin. Diterima saja. Nggak mungkin kita maksa mereka harus begini atau begitu...Itu sudah jiwanya kok,” ucap Susi mengakhiri perbincangan malam itu.

Berjejaring Memperjuangkan Keberagaman Identitas

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak komunitas LGBTIQ, GAYa Nusantara mendorong komunitas untuk meningkatkan kapasitasnya, termasuk dalam memoles citra di mata masyarakat. Citra yang baik diyakini dapat mengurangi potensi terjadinya penolakan hingga tindakan persekusi yang berbau kekerasan terhadap mereka dari kelompok lain di masyarakat.

Mak Vera kembali mengingatkan pentingnya komunitas untuk berperilaku wajar jika ingin mendapat kesetaraan di masyarakat.

“Contoh sederhana, seorang waria saat mengakses layanan di puskesmas ya jangan norak dan menor dandanannya. Nggak perlu juga pakai rok mini yang mencolok mata. Jangankan waria, perempuan biasa pun akan jadi pusat perhatian jika seperti itu. Stigma itu bisa muncul karena kita juga penyebabnya,” cetusnya tegas.

Pada sisi yang lain, GAYa Nusantara juga kerap mengajak komunitas untuk meningkatkan kapasitasnya terkait pemahaman akan hak yang melekat dalam dirinya, termasuk hak

kesehatan seksual dan reproduksi. Berjejaring dengan lintas komunitas menjadi bagian dari upaya mengampanyekan hal itu.

“Bagi kami, program yang dilakukan GAYa Nusantara sangat bermanfaat. Kami sering dilibatkan dalam berbagai penyuluhan di masyarakat. Menjadi fasilitator atau narasumber. Kami jadi punya kesempatan untuk berbaur dengan masyarakat,” ucap DN, seorang aktivis dari Persatuan Waria Kota Surabaya (Perwakos).

DN siang itu berada di sekretariat GAYa Nusantara bersama rekan lainnya dalam sebuah *focus group discussion* (FGD). Selain DN, ada tujuh peserta lainnya yang mengikuti diskusi. Mereka berasal dari organisasi dan latar belakang berbeda seperti lesbian maupun perempuan HIV positif.



Isu keberagaman menjadi salah satu topik diskusi bersama sejumlah komunitas di sekretariat Yayasan GAYa Nusantara (5/12/2019)
(Foto: Faisyal Sjahrial)

Pernyataan DN diamini peserta lain. LT seorang perempuan lesbian dari komunitas Gayatri, menceritakan dirinya beberapa kali terlibat dalam kegiatan GAYa Nusantara bersama Warga Peduli AIDS, KPA, Dinas Kesehatan, maupun bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ia menuturkan, selama ini komunitasnya jarang mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat.

“Dalam acara seperti itu, saya punya kesempatan untuk membuka mata masyarakat tentang keberadaan perempuan seperti saya. Setelah banyak berinteraksi, kenyataannya mereka biasa-biasa saja. Mereka baik-baik kok,” ungkapnya ringan.

LT mengakui, mengungkapkan statusnya sebagai seorang lesbian memang tidak mudah. “Saat kuliah dulu, saya pernah dihujat, diludahi, hingga ditendang orang, hanya karena saya menggandeng pacar perempuan saya. Tapi saya sekarang tidak mau membohongi diri saya lagi. Inilah saya apa adanya. Yang terjadi pada saya bukan kesalahan saya,” ucapnya tegas.

Para peserta diskusi menilai, interaksi dengan masyarakat secara langsung dapat menjadi sarana tepat untuk mengurangi stigma yang melekat pada komunitas, khususnya LGBT.

“Awalnya, masyarakat pasti bilang bahwa saya tidak normal. Bahkan banyak yang menyuruh saya agar bertobat. Namun, sekali lagi, kegiatan yang interaktif seperti itu membuat saya bisa menjelaskan tentang keragaman gender misalnya. Saya bisa bicara bahwa saya memang sejak lahir seperti ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan CNT, seorang waria dari Perwakos. Menurutnya, program yang dilakukan GAYa Nusantara dengan terjun langsung ke masyarakat itu sangat bagus. “Saya lebih senang melakukan sosialisasi langsung di masyarakat. Ini luar biasa menurut saya,” katanya bersemangat.

Menciptakan ruang dan kesempatan untuk berdialog langsung dengan masyarakat tampaknya menjadi hal penting bagi komunitas. Ruang dan kesempatan itu seharusnya menjadi bagian dari tugas para pembuat kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya. Namun sayangnya, menurut mereka, pemerintah kurang aktif memainkan peran itu.

Dengan demikian, program yang dilakukan GAYa Nusantara seakan menjadi pengisi ruang kosong itu. Masyarakat setidaknya mulai diajak untuk memahami apa sesungguhnya LGBT. Lebih jauh lagi, tersedia kesempatan untuk menjelaskan berbagai isu penting mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi, identitas gender, dan semacamnya. Tentu saja, dengan bahasa yang lebih sederhana.

Bersamaan dengan itu, secara internal, komunitas LGBT juga mendapat penguatan dari GAYa Nusantara menyangkut hak mendasar sebagai manusia. Tidak sedikit dari mereka yang kini berani bersuara saat berhadapan dengan masalah hukum namun tidak diperlakukan manusiawi. Akibatnya, menurut mereka, Satpol PP di Surabaya saat ini sudah jarang menggunakan kekerasan yang semena-mena saat melakukan razia pada waria di jalanan,

Keberhasilan komunitas GAYa Nusantara saat berinteraksi dengan masyarakat secara langsung menjadi bagian dari kisah sukses yang menarik untuk disimak. Pada bagian ini pula GAYa Nusantara memperkuat strateginya dengan penggunaan media sosial. Bagaimana pun, media sosial hari ini adalah keniscayaan.

Seakan meneruskan tradisi sebelumnya saat menggunakan majalah sebagai media informasi, saat ini GAYa Nusantara memiliki sejumlah *platform* media sosial yaitu facebook, instagram, twitter, dan kanal youtube. Keempat *platform* media sosial ini melengkapi *website* organisasi yang memang telah lama dibangun.

Melalui media sosial ini pula, GAYa Nusantara tidak hanya membantu kalangan komunitas, melainkan juga berbagai kalangan lain yang menjadi jaringan kerjanya. Puskesmas Kedungdoro, misalnya.

“Itu bagus banget. Layanan yang kami sediakan ikut dipromosikan oleh medsos-nya GAYa Nusantara. Masyarakat atau setidaknya komunitasnya GAYa Nusantara jadi tahu apa dan bagaimana kalau mau mengakses layanan kami,” ucap dr. Rr. Endang Dwiastutiningsih, Kepala Puskesmas Kedungdoro saat disinggung tentang peran GAYa Nusantara dalam membantu puskesmas.

“Bukan hanya puskesmas kami, tapi banyak puskesmas lain juga pasti terbantu dengan promosi medsos-nya. Saya yakin, sedikit banyak hal seperti itu bisa mendorong komunitas untuk mau mengakses layanan kesehatan di sekitarnya. Kami sangat terbantu,” tambahnya.

Pengakuan tulus semacam itu ibarat oase tak ternilai di tengah panas dan kerasnya stigma pada kelompok LGBT di wilayah lainnya di Indonesia. Oase itu tentu menyejukkan dan membangkitkan harapan bagi komunitas yang kerap terpinggirkan.

Penggalan cerita ini juga menutup rangkaian laporan tim Rumah Cemara dari tiga kota yang dikunjungi yakni Makassar, Pontianak, dan Surabaya. Sampai jumpa! *****

Sumber Data

1. Liputan dan wawancara langsung tim Rumah Cemara di Makassar (30 Oktober – 2 November 2019), Pontianak (11 – 14 November 2019), dan Surabaya (3 – 5 Desember 2019)
2. World Health Organization, 2017, *Laporan Kajian Nasional Respon HIV di Bidang Kesehatan Republik Indonesia*
3. Kementerian Kesehatan RI, 2020, *Laporan Perkembangan HIV/AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan IV Tahun 2019*
4. Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Survei Terpadu Biologis dan Perilaku 2018 – 2019*
5. Kementerian Kesehatan RI dan Perwakilan Tetap RI untuk PBB di New York, Siaran Pers Bersama, 2016: <http://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20160610/2915118/indonesia-tingkatkan-komitmen-penanggulangan-hiv-aids/>
6. Website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak: <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/jumlah-penduduk-kota-pontianak-semester-i-tahun-2019-berjumlah-667053-jiwa>
7. Pontianak Post, <https://pontianakpost.co.id/programkan-bpjs-kesehatan-gratis-bagi-odha-dan-ohida/2/>
8. Website Yayasan GAYa Nusantara: <https://gayanusantara.or.id/about/vision-mission/>